

DAFTAR BACAAN

BUKU

Arto, Mukti., *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.

Bruggink, JJ.H., *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Chazami, Adami., *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Chazawi, Adami., *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana: Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-surat*, Bayumedia, Malang, 2005.

Hamzah, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi revisi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014.

Harahap, Muhammad Yahya., *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Harahap, Muhammad Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Harahap, Muhammad Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

HR, Ridwan., *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Ibrahim. Johnny, *Teori & Metode Penelitian Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 2018.

Marpaung, Leden., *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Marzuki. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 2016, Prenadamedia Group, Jakarta.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1995.

Purwoleksono, Didik Endro., *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.

Purwoleksono, Didik Endro., *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013.

Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986.

SKRIPSI

Gardanusa, *Peninjauan Kembali Atas Putusan Peninjauan Kembali di Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus: Djoko Soegiarto Tjandra)*, **Skripsi**, Program Studi Ilmu Hukum, Jakarta.

Islami, Faisal., *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013*, **Skripsi**, Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Usman, Nursyamsi., *Eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dalam Proses Peninjauan Kembali*, **Skripsi**, Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Ps 10 ayat (2).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3316), Pasal 34 ayat (4).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 24 ayat (2).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), Ps. 263 ayat (1).

JURNAL

Gumbira, Seno Wibowo., Problematika Peninjauan Kembali Dalam Sistem peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-asas dalam Hukum Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 46, No. 1, 2016.

Haq, Nasrul dan Firman Umar, Persepsi Jaksa Terhadap Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali (Studi Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan), *Jurnal Tomalebbi*, Vol III, No. 1, 2016.

Oktotfianus, Mario., Peninjauan Kembali Pasal 268 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, *Lex Administratum*, Vol III, No 1, 2015.

Putra, I Gusti Made Agus Mega, Pertentangan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/ 2013 Terkait Peninjauan Kembali, *Kertha Negara*, Vol. 03, No. 02, 2015.

Supit, Allan Rouwman., Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 7, 2016.

Hikmawati, Puteri., Kontroversi Surat Edaran Mahkamah Agung Mengenai Pengajuan Peninjauan Kembali Satu Kali, *Info Singkat Hukum*, Vol. VII, No. 01, 2015.

INTERNET

Ali, Mohammad Mahrus., Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/12310>, dikunjungi pada tanggal 5 September 2020.

Khalisotussurur, Lilis., Peninjauan Kembali Boleh Dua Kali Untuk Keadaan Tertentu, <https://www.gresnews.com/berita/hukum/100573-peninjauan->

[kembali-boleh-dua-kali-untuk-keadaan-tertentu/#:~:text=SEMA%2010%2F2009%20ini%20berisi,pengadilan%20agama%20dan%20pengadilan%20umum.](#), 10 Juni 2015, dikunjungi pada 10 November 2020.

Ledysia, Septiana., Ketua MA Tegaskan PK Hanya Sekali Sesuai UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman, <https://news.detik.com/berita/d-2796427/ketua-ma-tegaskan-pk-hanya-sekali-sesuai-uu-ma-dan-uu-kekuasaan-kehakiman>, 7 Januari 2015, dikunjungi pada tanggal 10 November 2020.

Yasin, Muhammad., Kronologis Perkembangan Pemikiran tentang Keharusan Terpidana Menghadiri Sidang Permohonan PK, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f24af8a46be0/kronologis-perkembangan-pemikiran-tentang-keharusan-terpidana-menghadiri-sidang-permohonan-pk?page=all>, 1 Agustus 2020, dikunjungi pada tanggal 1 Desember 2020.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pid/2000.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 64PK/Pid.Sus/2009

Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 PK/Pid.Sus/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12PK/Pid.Sus/2009.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 156/Pid.B/2000/PN Jak.Sel.